



Membangun **kinerja** **secara berkelanjutan** Laporan Tahunan 2019





Visi 2039 bersifat Dinamis,
Visi kami dan rencana yang
diwujudkan akan berkembang menjadi
perusahaan yang
membuat perubahan di industri penjaminan

Kami percaya bahwa kemajuan
yang berkelanjutan didorong oleh
orang-orang
yang mempunyai **imajinasi dan**
antusiasme yang
tinggi untuk memperbaiki masa depan kita
dan masa depan dari orang di sekitar kita

Kami didirikan tidak semata-mata
menjanjikan laba,
tapi **MAMPU**
menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM
dan menggerakkan aktivitas
ekonomi masyarakat ”

2019 HIGHLIGHTS

Laba sebelum Pajak

Rp16 M

(2018 : Rp 11.55 M)

Total Aset

Rp277,5M

(2018 : 227,5 M)

Rasio Likuiditas

390%

(2018 : 514%)

Laba Operasi

Rp15,4 M

(2017 : 10,37)

Penjaminan Produktif

28,1%

(2018 : 28,3%)

Return on Asset

5,8%

(2018 : 5,1%)

Gearing Ratio

21 Kali

(2018 : 17,8 Kali)

Pendapatan Asli Daerah

Rp6,8 M

(2018 : 4.73 M)

Rasio Klaim terhadap IJP

48.7%

(2018 : 42.41%)

DAFTAR ISI

Laporan Strategik

2019 Highlights	2
Produk Unggulan	3
Skema Penjaminan	4
Kinerja 2019	5
Sambutan Komisaris Utama	7
Sambutan Direktur Utama	9
Profil Perusahaan	12
Komposisi Pemegang Saham	12
Visi & Misi	13
Strategi Perusahaan	15
Aksi Strategi 2019	16
Model Bisnis	18
Profil Organisasi	20
Review Operasional	23

Tata Kelola Perusahaan 25

Kilas Balik Perusahaan 45

Tanggung Jawab Sosial 49

Laporan Keuangan 50

Informasi lainnya 83

catatan : M = Milyar

STARTUP

MANAGEMENT SOLUTIONS

Produk Unggulan

Kami melakukan kegiatan usaha dalam 4 segment, menyediakan kebutuhan nasabah, memberikan nilai tambah dan pelayanan yang optimal



Penjaminan Kredit Produktif

Kami menjamin Kredit Produktif untuk UMKM dengan tujuan membantu akses permodalan ke lembaga keuangan bank / non bank dan koperasi



Penjaminan Kredit Komersial

Kami menjamin kredit komersial untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui skema potong gaji atau setor aktif



Custom Bond

Kami memberikan kemudahan penjaminan yang diberikan kepada Importir & Exportir yang berkaitan dengan fasilitas penundaan, pembebasan bea masuk dan kewajiban kepabeanan lainnya untuk kepentingan negara



Surety Bond/ Bank Garansi

Kami memberikan kemudahan kepada pengguna anggaran untuk menjamin proyek yang berasal dari APBD / APBN / Swasta

Skema Penjaminan

Setiap pelanggan adalah unik , produk kami menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kami juga melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan produk melalui dua skema penjaminan

Penjaminan Langsung

Kami mencari nasabah secara langsung dengan melakukan penilaian kelayakan usaha , apabila usaha layak dibiayai maka kami memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan / koperasi yang telah bekerjasama untuk memberikan pinjaman yang akan dijamin oleh kami

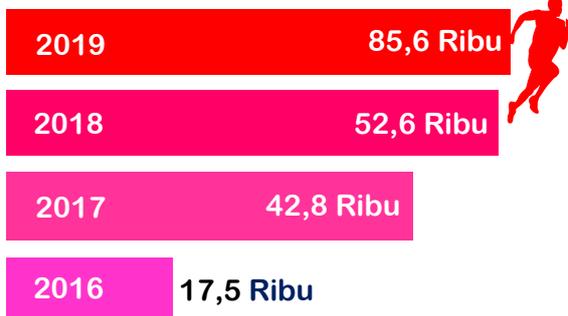
Penjaminan Tidak Langsung

Penjaminan nasabah dilakukan melalui lembaga keuangan / koperasi yang telah bermitra dengan kami , memberi pilihan kepada mitra tentang bagaimana penjaminan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah

KINERJA 2019

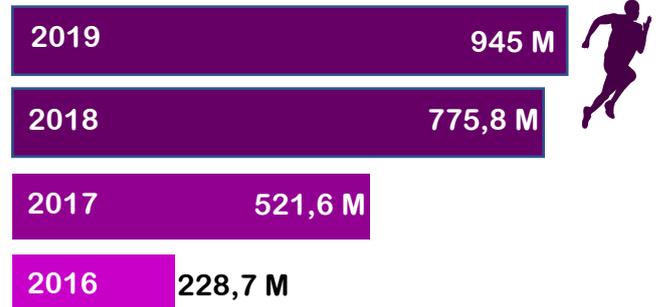
Jumlah Terjamin Produktif (Ribuan)

85,6 Ribu



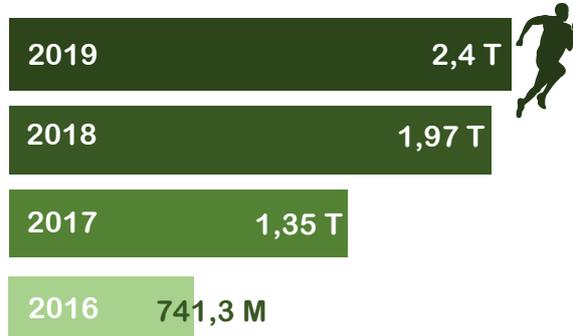
Nilai Penjaminan Produktif (Rupiah)

945 M



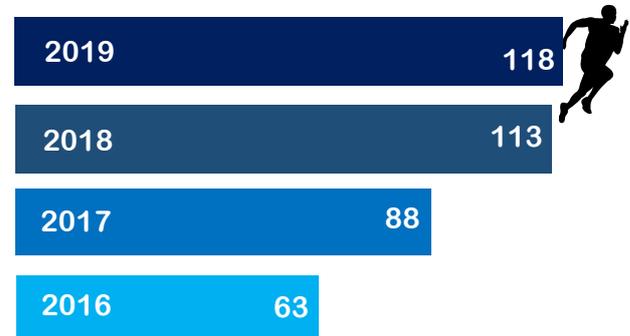
Nilai Penjaminan Komersial (Rupiah)

2,4 T



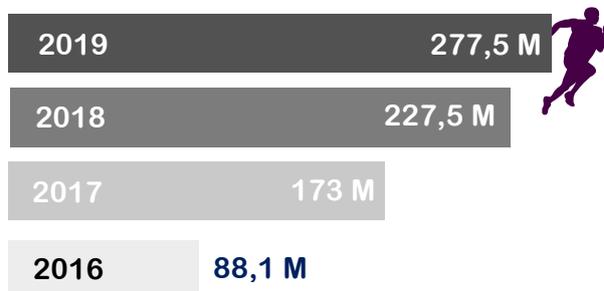
Jumlah Perjanjian Kerjasama

118 Perusahaan

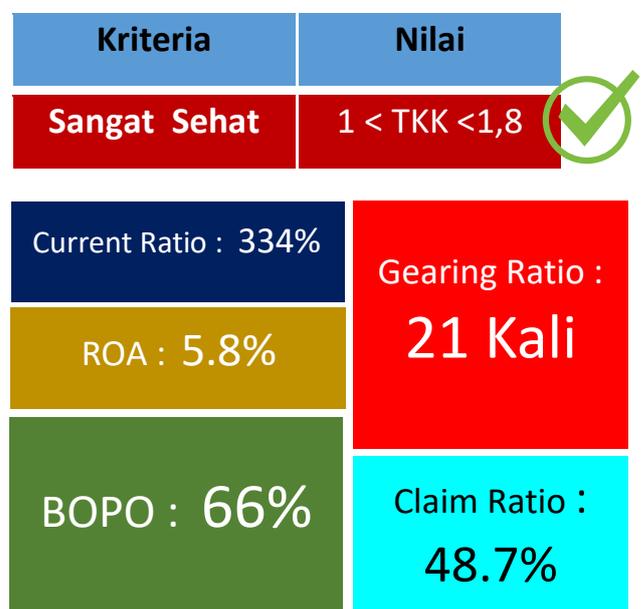


Total Asset - Rupiah

277,5 M

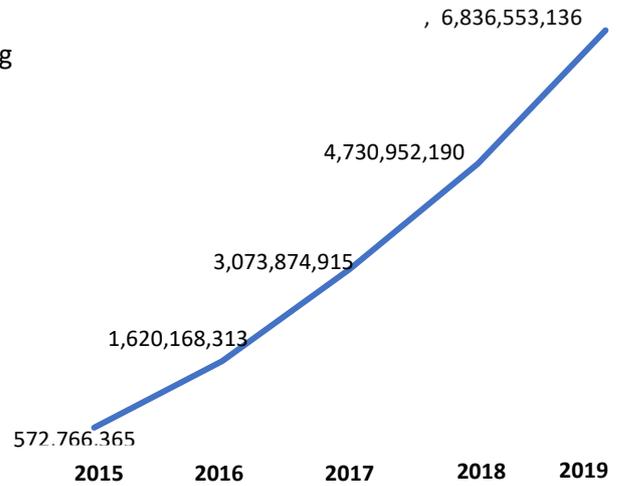
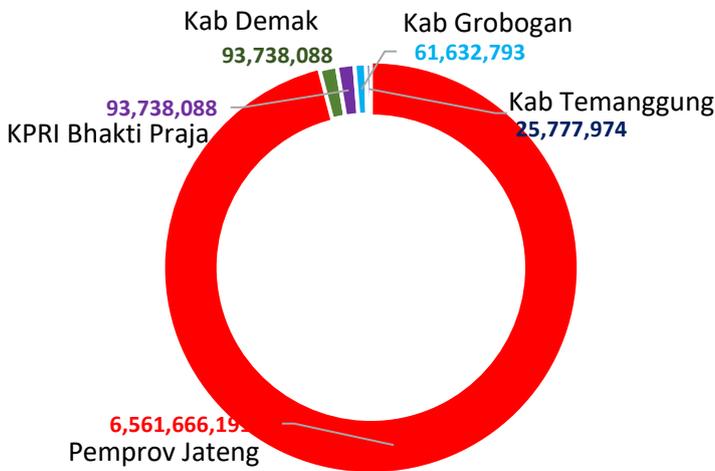


Tingkat Kesehatan Keuangan



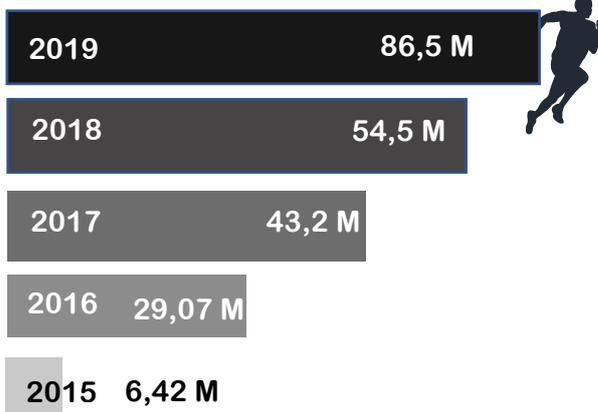
Pendapatan Asli Daerah 2019- Rp
6,83 M

Pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah-Rp



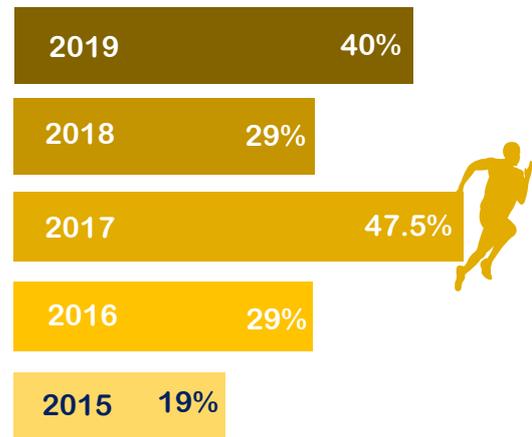
IJP Cash Basis (Rupiah)

86,5 M



Net Profit Margin (%)

40%



Fokus pada strategi prioritas dan menghasilkan nilai yang berkelanjutan



Para Pemangku kepentingan yang terhormat,

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. Jamkrida Jateng sehubungan dengan kebijakan pengelolaan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, berikut Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana telah di telaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan

Keuangan & Solvensi

Pada tahun 2019 rasio likuiditas Jamkrida Jateng mencapai 334% atau terealisasi sebesar 95% dari RKAP tahun 2019, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 436% terjadi peningkatan penggunaan dana dan atau penurunan pasiva lancar operasional

Realisasi jumlah penjaminan yang dilakukan PT. Jamkrida Jateng selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.358,97 milyar, dari jumlah tersebut sebesar 28,13% merupakan penjaminan produktif atau Rp. 945,07 Milyar sedangkan sisanya 71,87 % atau sebesar Rp. 2.413,90 Milyar merupakan penjaminan komersial terealisasi sebesar 94%, untuk penjaminan usaha produktif 92% dan penjaminan usaha komersial terealisasi sebesar 95%. Dari total realisasi penjaminan tahun 2019 terlihat bahwa target dalam RKAP tahun 2019 terealisasi sebesar 94%, untuk penjaminan usaha produktif 92% dan penjaminan usaha komersial terealisasi sebesar 95%.



2019 adalah tahun yang memberikan hasil nyata pada penjaminan UMKM dan kami membangun kemampuan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang bisnis perusahaan //

Sujarwanto Dwiarmoko
Komisaris Utama

Dewan komisaris telah memberikan arahan kepada direksi khususnya dalam meningkatkan penjaminan kepada para pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan risiko sehingga realisasi penjaminan usaha produktif bisa lebih maksimal.

Pada tahun 2019 Realisasi Laba bersih sebesar Rp. 12,42 Milyar atau 101% dari target RKAP tahun 2019. Faktor dominan yang mempengaruhi pendapatan dan biaya adalah:

1. Pendapatan usaha terealisasi sebesar Rp. 35,01 Milyar atau 94% dari target RKAP.
2. Beban klaim terealisasi sebesar Rp. 17,06 milyar atau 118% dari RKAP, dimana faktor klaim bruto dominan mencapai 107% dari target sedangkan sisanya merupakan peningkatan cadangan klaim.
3. Beban usaha terealisasi sebesar Rp. 14,39 milyar atau 85% dari RKAP. Faktor dominan adalah beban gaji terealisasi sebesar Rp. 4,37 milyar atau 60% dari RKAP, sedangkan beban penyusutan dan amortisasi terealisasi sebesar Rp. 1,27 milyar atau 149% dari RKAP.
4. Faktor pendapatan dan beban Non operasional selama tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 12,47 milyar atau 126% dari target RKAP. Akun ini didominasi oleh pendapatan bunga atas investasi.

Memperhatikan realisasi pendapatan dan biaya serta rata-rata aset yang terealisasi pada tahun 2019, ROA pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 5,8% atau 98% dari target RKAP. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 tumbuh sebesar 14%.

Gearing ratio total pada posisi 31 Desember 2019 terealisasi 20,66 kali atau 94% dari target RKAP atau 21 kali *gearing ratio* penjaminan usaha produktif dan usaha komersial

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menjalankan peran pengawasannya sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi, memberikan persetujuan dalam kewenangannya sesuai ketentuan untuk memastikan semua kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang sebelumnya ditetapkan dan disetujui untuk tahun 2019. juga meninjau dan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang saham untuk memastikan semua kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Laporan Keluhan Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Bahwa setelah dilakukan penelaahan atas laporan klaim sepanjang tahun 2019 yang disampaikan tim Klaim Perusahaan menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi standar dari pelayanan dan penyelesaian klaim yang baik.

Dewan Komisaris menyadari sepenuhnya persaingan industri penjaminan yang terjadi di tahun 2019, oleh karenanya Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi senantiasa menempatkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepentingan terjamin, menjalankan bisnis dengan menjaga kecukupan likuiditas, memelihara kualitas aktiva produktif, serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas kinerja dari karyawan perusahaan antara lain melalui berbagai perubahan fundamental.

Akhir kata, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan kepada Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan atas dedikasi usaha dari seluruh karyawan Perusahaan pada tahun 2019

Semarang,

Mei 2020

Sujarwanto Dwiatmoko
Komisaris Utama

Memperkokoh landasan untuk kesuksesan masa depan



Para Pemangku kepentingan yang terhormat,

Jamkrida Jateng memiliki orang-orang yang mempunyai kapabilitas, layanan pelanggan yang baik dan penjaminan yang handal. Sangat menarik untuk menjadi bagian dari bisnis yang menempatkan program UMKM dan usaha produktif sebagai tujuan sebagai mana yang di amanatkan oleh para pendiri kami .

Ada banyak skala prioritas tahun ini, dan saya senang bahwa di tengah-tengah perubahan bisnis , pasar yang sangat kompetitif dan latar belakang peraturan yang berkembang, kami telah memberikan serangkaian hasil keuangan yang baik, dengan kualitas operasional yang meningkat, menunjukkan disiplin pada nilai utama model bisnis kami. Secara keseluruhan, saya bangga dengan kemajuan terhadap target strategis dan keuangan yang telah ditetapkan.



**Strategi dan keberhasilan
pencapaian target
merupakan hasil dari kerja
cerdas
yang ditunjukkan di seluruh
bisnis kami
dan telah memberikan
manfaat kepada pelanggan
serta kepada pemegang
saham //**

**M Nazir Siregar
Direktur Utama**

Lingkungan Eksternal

Kami terus melakukan kegiatan dalam peraturan yang sangat dinamis dan berkembang diantaranya penerapan UU No 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Disisi lain *gearing ratio* telah mencapai 21 kali yang perlu diimbangi dengan penyertaan modal, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola perusahaan agar tetap dapat melakukan penjaminan secara berkelanjutan

Efisiensi

Kami tahu bahwa tetap efisien dan fleksibel adalah kunci untuk meningkatkan daya saing kami di masa depan. Hal ini tercermin dengan realisasi efisiensi sebesar 16% dari RKAP 2019.

Kami perlu terus berubah dan kami telah melakukan penyempurnaan integrasi sistem untuk meningkatkan daya saing bisnis kami.

Kami juga telah menyederhanakan dan meningkatkan layanan klaim kami. Misalnya, pelanggan sekarang dapat mengunggah seluruh kelengkapan dokumen klaim, melacak status klaim secara online.

Persiapan ISO 9001 merupakan landasan proses operasional kami dimasa depan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi *standar level agreement* (SLA) kepada nasabah kami

Budaya dan kapabilitas

Karyawan adalah fondasi bisnis kami.

Karyawan kami telah berperan penting dan memberikan dampak terhadap perubahan yang kami perlukan untuk mewujudkan tujuan.

Kami sangat mengapresiasi bahwa secara keseluruhan orang-orang kami terlibat dalam pengembangan bisnis dan saling berbagi pengetahuan,

keترampilan, pengalaman dan keberhasilan.

Kami memiliki serangkaian rencana aksi yang berkembang, mengumpulkan umpan balik dari orang-orang kami untuk memastikan kami fokus pada bidang-bidang yang perlu kami tingkatkan.

Kami juga telah berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk dapat melayani pelanggan, membantu berinteraksi kepada pelanggan dengan cara yang baru dan menyegarkan.

Kinerja Bisnis

Pada tahun 2019 laba setelah pajak sebesar Rp 12.42 Milyar meningkat sebesar 44 % dibandingkan dengan tahun 2018, *Return On Asset* sebesar 5.8% meningkat 14% dari tahun 2018.

Jumlah terjamin 336,600 yang terdiri dari Terjamin Produktif 85,683 (2018 ; 52,585) dan komersial 250.917 (2018 ; 184,085), sedangkan Total Nilai Penjaminan retensi sendiri 3,358 T yang terdiri dari Produktif 945 M (2018;775,84 M), Komersial 2,4 T (2018 ; 1,97 T)

IJP Gross *accrual basis* mencapai Rp50,9 Milyar (2018 ; Rp 30,9 Milyar), sedangkan IJP nett mencapai Rp35 Milyar (2018 ; 22,93 Milyar), Rasio Klaim mencapai 48,7 % (2018 ; 42,4%), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) 66,2% (2018 ; 66,9%), Total IJP ditanggungkan Rp93,5 Milyar (2018 ; Rp58 Milyar), Kas & Setara Kas Rp 58,7 Milyar (2018 ; 53,8 Milyar), Deposito Berjangka Rp 99,7 Milyar (2018 ; Rp89,4 Milyar), Sertifikat Berharga Negara (SBN) Rp 31,4 Milyar (2018 ; Rp27,5 Milyar)

Secara keseluruhan, rasio keuangan tahun berjalan sangat baik dan *grade* tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah **“sangat sehat”**, hal ini ditopang oleh produk yang terdiversifikasi, manajemen risiko yang *prudent* serta biaya operasional yang efisien.

Outlook

Perusahaan meningkatkan tata Kelola perusahaan dengan adanya komisaris Independen dan komite audit, mendapatkan sertifikasi ISO 9001, menargetkan tingkat Kesehatan keuangan dalam kategori sangat sehat, cadangan klaim tahun 2020 ditingkatkan, tingkat reasuransi yang dibeli oleh Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi profil risiko penjaminan.

Dengan adanya Covid 19 , Perusahaan berusaha mempertahankan kinerja perusahaan dengan menambah kegiatan usaha dan memperluas penjaminan langsung kepada nasabah, investasi dan subrogasi memainkan peranan penting untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Selain itu, Perusahaan menargetkan untuk meningkatkan efisiensi. Pada 2020, Perusahaan akan membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengurangi biaya operasi dan menargetkan biaya operasi di bawah antara 95 % sampai dengan 97% dari Anggaran.

Kami menargetkan kenaikan laba bersih sebesar 9% sampai dengan 12% dari realisasi laba tahun 2019, kami berencana meningkatkan fleksibilitas kami untuk menghadapi perubahan dan kebutuhan bisnis, karyawan-karyawan berbakat akan membantu mewujudkan misi perusahaan.

Kekuatan fundamental kami sebagai bisnis terus memberikan manfaat, saya bangga bahwa program perbaikan secara berkelanjutan memberi kesempatan meningkatkan kemampuan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham.

Semarang, Mei 2020

Atas nama Direksi

M Nazir Siregar
Direktur Utama



PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PROFIL PERUSAHAAN

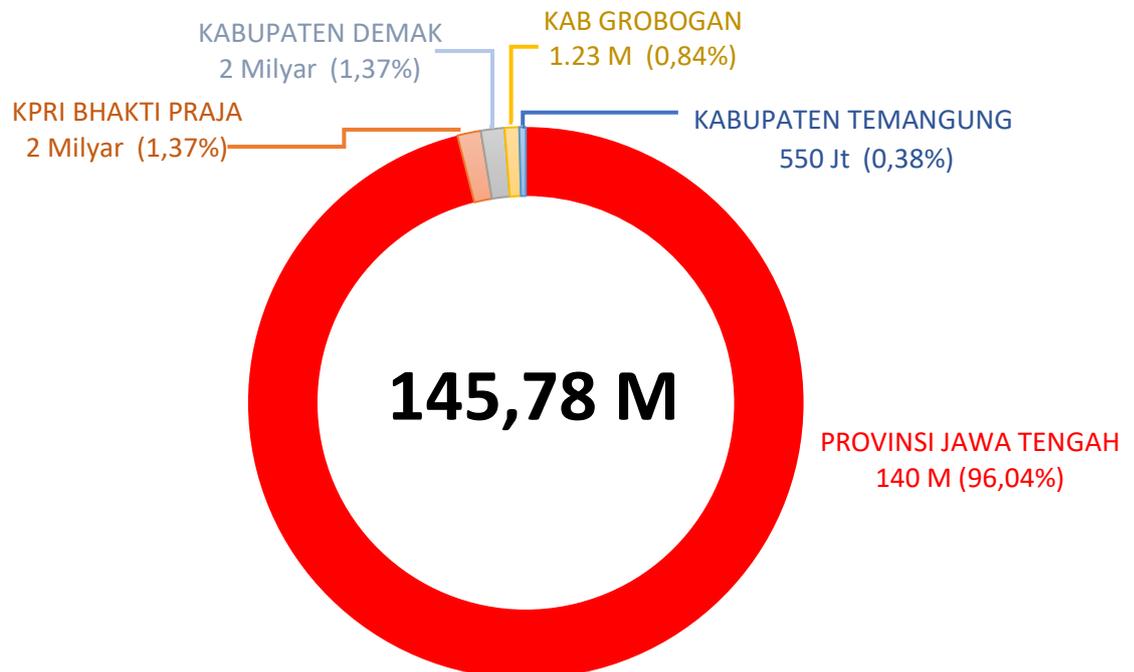
PT Jamkrida Jateng memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015

Di tahun 2019 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (*Cash Basis*) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 86,5 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 118 Mitra

PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, *surety bond*, *custom bond*, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah.

Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional, Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 336.000 Terjamin Aktif di Jawa Tengah

Komposisi Pemegang Saham



VISI & MISI

Visi 2039 bersifat Dinamis, Visi Jamkrida Jateng dan rencana yang akan diwujudkan akan berkembang menjadi perusahaan yang membuat perubahan di industri penjaminan

visi

“menjadi yang Terbaik dalam keamanan penjaminan kredit , terdepan dalam pelayanan penjaminan kredit di Indonesia”

Misi

menjadi mitra solusi bagi nasabah kami , memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

Nilai-nilai Perusahaan

I SAFE

Untuk mencapai Visi Misi dan Strategi Perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas



Integritas

Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan *good corporate governance*



Sinergi

Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya



Antusias

Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, keberanian dan Menghargai perbedaan



Fokus Pada Solusi

Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan pelanggan

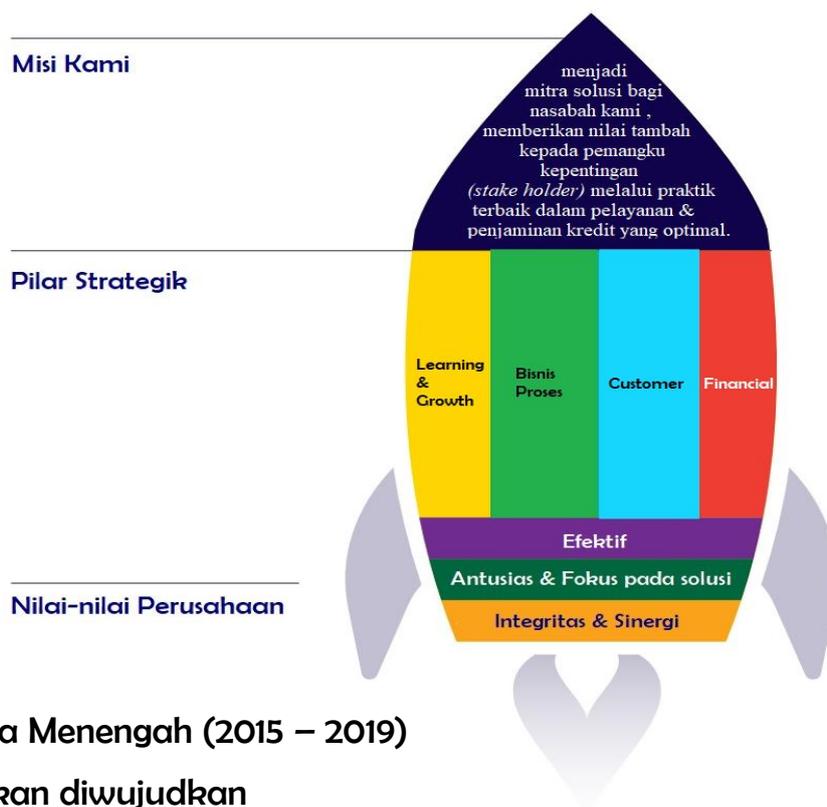


Efisien & Efektif

Kami mencari cara yang efektif & efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas

Strategi Perusahaan

Sasaran Jangka Panjang 25 Tahun



Sasaran Jangka Menengah (2015 – 2019)

Sukses yang akan diwujudkan

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan	Perspektif Bisnis Proses	Perspektif Customer	Perspektif Financial
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil output sumber daya harus positif dengan <i>benchmark</i> perusahaan yang sejenis Jamkrida Jateng, Penyempurnaan system dan inovasi ditingkatkan. ✓ Pembinaan di sisi HULU yaitu analisis beban kerja, analisis tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. ✓ Pengembangan pelatihan dan pendidikan. ✓ Standarisasi gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fokus Pelayanan Optimal kepada nasabah ✓ Pengembangan Infrastruktur termasuk pengembangan <i>Web based</i>, data dan informasi berbasis digital dengan penggunaan "<i>user friendly</i>" ✓ Klaim: reputasi penanganan klaim yang cepat, tepat dan adil ✓ Efisien & Efektif dalam melakukan proses dan tindakan ✓ Diversifikasi Produk Penjaminan ✓ Mitigasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan secara akumulasi Rp 75 Milyar (Moderat), Rp 95 Milyar (Optimis) ✓ Meningkatkan <i>Market Share</i> Jaminan Kredit dari Pendapatan IJP Nasional ✓ Mengembangkan jaringan Distribusi & Promosi ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik ✓ Target Portfolio Produksi 80% Jaminan Kredit 20% Non penjaminan Kredit ✓ <i>Benchmarking</i> & <i>Rating</i> Pefindo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan modal & asset sebesar Rp 200 Milyar untuk dapat melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia ✓ Diversifikasi Investasi dengan tingkat pengembalian positif ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik ✓ Aktif dalam melakukan <i>Corporate Social Responsibility</i> ✓ Perusahaan dengan kategori sehat (kategori A)

AKSI STRATEGI 2019

Kami menyempurnakan setiap bagian dari bisnis kami untuk memastikan bahwa produk kami dapat diterima , mudah dalam pelayanan dan proaktif memberikan solusi



Orang berbakat

Dukungan dari *Stake Holder* dan Perpaduan yang diciptakan dengan memiliki orang-orang berbakat dalam bisnis, dengan keterampilan yang berbeda membantu kami mengembangkan *team work* untuk mencapai tujuan
“ Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, namun sebagai *TRIGGER* untuk menggerakkan perekonomian jawa tengah”



Tarif yang kompetitif

Setiap pelanggan adalah unik, kami menyesuaikan tarif dan ketentuan sesuai dengan profil risiko dan kelayakan usaha



Integrasi Sistem

Penyempurnaan Integrasi system Appline (Aplikasi Penjaminan Online) , CMS (Cash Management System), Penjaminan Risiko dan Divisi lainnya memberikan pengaruh yang positif terhadap data yang disajikan sehingga keputusan yang diambil dapat diandalkan

Pelayanan Prima

Nasabah merupakan hal terpenting, kami melakukan Langkah-langkah dan program yang mendukung pelayanan yang optimal dan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan nasabah



Efisiensi Biaya

Jumlah keseluruhan biaya yang direalisasikan mencapai 85% dari jumlah anggaran, hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan aktivitas kami selalu memperhatikan biaya terhadap benefit



Perluasan Jangkauan

Kami telah melakukan perluasan usaha Penjaminan Langsung terhadap usaha *start up* atau usaha yang tidak *bankable* namun *feasible*, model ini akan dikembangkan ditahun-tahun berikutnya

Menciptakan Nilai Tambah bagi Stakeholder

Kegiatan usaha kami dan multi saluran distribusi menawarkan berbagai pelayanan kepada pelanggan yang berbeda. Kami percaya pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dan imbal balik yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

Kekuatan Kami

Fokus pada Customer

Kami menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, Kegiatan usaha dan saluran distribusi bertujuan untuk mempermudah akses penjaminan dan memberikan nilai tambah. Layanan klaim yang cepat, akurat dan efisien, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan

Karyawan Berbakat

Kami berinvestasi kepada karyawan yang berbakat, mendorong semua karyawan agar bekerja secara optimal, inovasi dan kreatifitas ditingkatkan sehingga kami secara terus menerus dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang

Data & Teknologi

Kami memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelanggan dan karyawan. Kami bertujuan menggunakan teknologi yang fokus kepada pelanggan.

Modal & Kekuatan Keuangan

Kami memiliki model bisnis yang sederhana, namun *powerful* dalam menghasilkan pendapatan, penjaminan risiko yang selektif, pengelolaan klaim, pengendalian biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi pemegang saham

Layanan Kami

01 Penjaminan Kredit

02 Surety bond

03 Customs Bond

04 Kontra Bank Garansi

Tingkat Pengembalian

Kami berusaha memastikan bisnis kami dilakukan dengan baik dan terkendali. Kami mengelola keuangan dengan hati-hati dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

IJP Bersih



Klaim Bersih



Biaya



Investasi &
Pendapatan
lainnya



Profit

Nilai yang berkelanjutan

Karyawan

Karyawan merupakan aset perusahaan, kami berinisiatif mengembangkan, menciptakan nilai budaya berkinerja tinggi berdasarkan keragaman, pelatihan dan fokus kepada nasabah

Proses Bisnis

Kami secara terus menerus memperbaiki proses yang ada agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien

Customer

Kami menawarkan penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan layanan optimal serta memelihara hubungan emosional dengan mitra

Financial

Kami bertujuan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan meningkatkan penjaminan bagi UMKM /Usaha produktif

PROFIL ORGANISASI

KOMISARIS UTAMA



Ir Sujarwanto Dwiatmoko, Msi

Komisaris Utama

Pria, kelahiran Klaten, lulus S1 dari Fakultas Teknik Geologi UPN "VETERAN" tahun 1984, S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada tahun 1990, S3 Program Doktor Administari Publik Universitas Diponegoro

Berbagai bidang telah ditangani diantaranya Kepala Balai Pertambangan dan Energi Wilayah Seayu, Kepala Sub Dinas Pengawasan, PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , Kepala Biro Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah

Memimpin Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah selama 5 tahun periode 2010 - 2015. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah tahun 2016. Tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tahun 2019 menjadat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun , Satya Lancana Karya 20 tahun dan Satya Lancana Pembangunan (bidang Koperasi dan UMKM)

DIREKSI



M Nazir Siregar

Direktur Utama

Pria, Kelahiran Marbau – Sumatera Utara, Menyelesaikan Pendidikan S1 di STMA (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi) Trisakti tahun 2004, S2 dari Binus University tahun 2019 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 3.

Pengalaman di Industri Asuransi Jiwa selama 17 tahun lebih, berkarir di PT AJ Manulife Indonesia lebih dari 11 tahun dari tahun 1997 s.d tahun 2008, 6 tahun di Perusahaan asuransi Jiwa *Join Venture* dan Nasional dengan berbagai tanggung jawab dibidang Operasional, Marketing, Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategi.

Mendapat Gelar :

- Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) dari AAMAI
- Fellow Life Management Institute (FLMI) dari LOMA
- Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) dari PAMJAKI
- Associate Customer Service (ACS) dari LOMA
- ANZIIIF Associate CIP

Adi Nugroho

Direktur

Pria, Kelahiran Yogyakarta, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1995, pendidikan S2 di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta tahun 2001 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 4

Pengalaman di Industri Penjaminan & Lembaga Keuangan selama 18 tahun lebih, Berkarir di Perum Jamkrindo periode 1996 – 2004, PT Permodalan Nasional Madani (persero) periode 2005 – 2011, Bank Andara periode 2011 - 2013 & PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode 2013 – 2014 dengan berbagai tanggung jawab di Bidang Operasional & Pemasaran

Mendapatkan penghargaan :

- Best Team Lending Se Indonesia dari PT Bank Andara tahun 2012
- Cluster Manager Terbaik se Jawa Tengah dari PT PNM (Persero) tahun 2009.



KEPALA DIVISI



Joko Haryanto

Kepada Divisi Customer Relation

Pria, Kelahiran Wonogiri – Jawa Tengah 23 Mei 1961, menyelesaikan Pendidikan Akademi di STIE AUB Pancasila Surakarta tahun 1985.

Berpengalaman di industri Asuransi selama lebih dari 29 tahun, antara lain pernah berkarir di PT. Asuransi Tugu Bunas General Insurance (BUN Group) Semarang, Jakarta dan Solo periode 1991 – 1997, PT. Asuransi Ikrar Loyd General Insurance (Bakrie Group) Semarang dan Jogja periode 1999 – 2004, PT. Asuransi Intra Asia General Insurance Semarang periode 2006 – 2012, dengan berbagai tanggung jawab di bidang Akseptasi, Keuangan, dan Marketing.

Menjalani Pendidikan profesi :

- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) “ Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Dasar “C” di Jakarta LULUS Tahun 1991.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) “ Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Lanjutan “B” Non Marine di Jakarta LULUS Tahun 1995.

Meidhi Suryadi

Kepala Divisi Finance Accounting & Investasi

Pria, kelahiran Surabaya 8 Mei 1963, menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi Perbankan di UPN Veteran Jakarta tahun 1988.

Berpengalaman di bidang Asuransi dan Leasing selama kurang lebih 27 tahun, berkarir di PT. Air Multi Finance Corp periode 1990 – 1997, PT. Asuransi Jiwa Bakrie periode 2002 – 2010, PT. Asuransi Jiwa Recapital periode 2011 – 2016, dan 7 tahun di perusahaan Leasing & Contractor dengan berbagai tanggung jawab di bidang Accounting, Finance, HRD dan GA.

Mendapat Gelar :

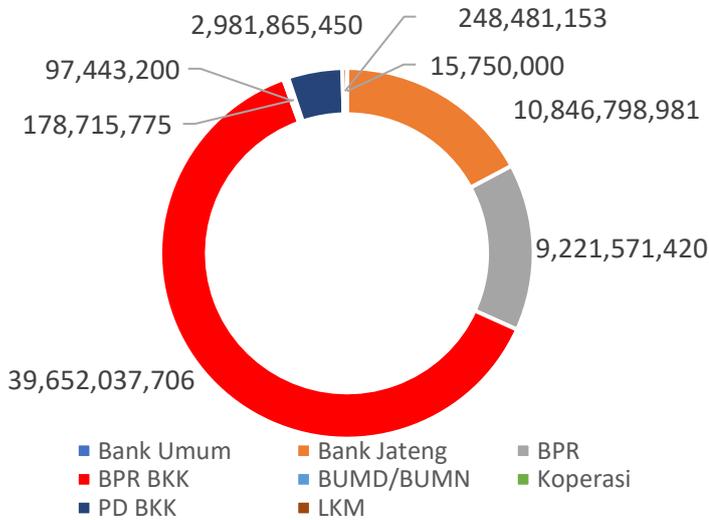
Best Motivator Team Building di Perusahaan Bakrie Grup pada tahun 1998





Penjaminan Komersial

IJP Cash Basis By Channel



Jumlah Terjamin
159,267

IJP Accrual Gross
Rp38,87 m

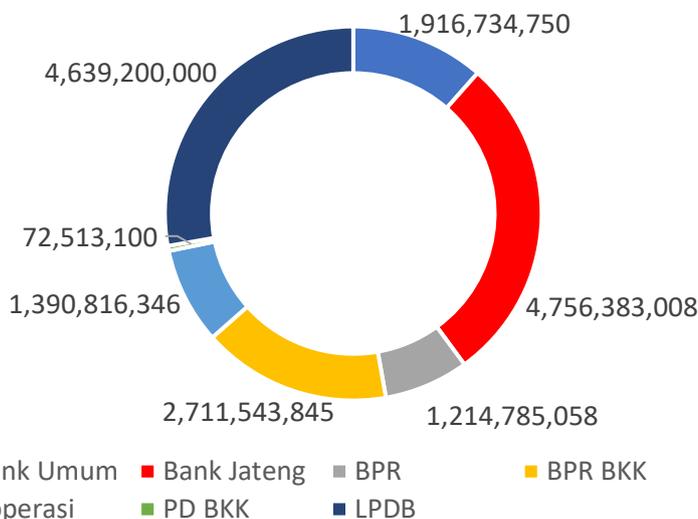
Operating Profit
Rp20,23 m

Rasio Klaim
48%



Penjaminan Produktif

IJP Cash basis by Channel



Jumlah Terjamin
22,474

IJP Accrual Gross
Rp9,24 m

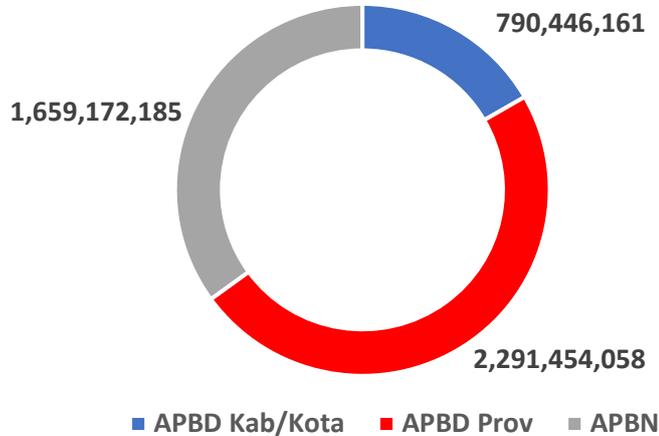
Operating Profit
Rp5,7 m

Rasio Klaim
38,2%



Suretyship

IJP by the Government Budget



Jumlah
Terjamin
1,133

IJP Accrual
Gross
Rp2,78 m

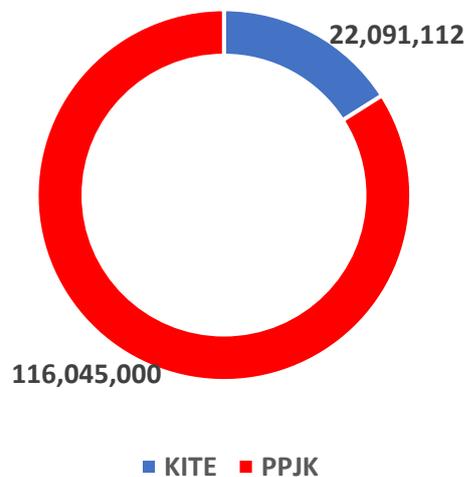
Operating
Profit
Rp1,65 m

Rasio
Klaim
41%



Customs Bond

IJP Gross by customs type



Jumlah
Terjamin
119

IJP Accrual
Gross
Rp103 jt

Operating
Profit
Rp103 jt

Rasio
Klaim
0%



LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT JAMKRIDA JATENG

Setiap tahun Jamkrida Jateng selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara maksimal. Di tahun 2019 ini Jamkrida Jateng telah berhasil melakukan peningkatan-peningkatan yang diperlukan dalam penerapan Good Corporate Governance (“GCG”) untuk mencapai visi-nya menjadi penyelenggara jasa penjaminan yang terdepan di Indonesia, dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan penjaminan nasabah kami.

Setiap tahun, Jamkrida Jateng melakukan penilaian mandiri secara berkelanjutan atas penerapan tata kelola perusahaannya. Penilaian mandiri ini didasari oleh POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga penjamin

Jamkrida Jateng juga telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan tersebut di atas digunakan oleh Jamkrida Jateng dalam mengembangkan pelaksanaan nilai-nilai GCG didalam perusahaan.

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan	Kewarganegaraan	Domisili
1.	M. Nazir Siregar	Direktur Utama	No : KEP-132/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Perumahan Duta Bukit Mas, Jl Duta Indah No 31 Banyumanik Semarang
2.	Adi Nugroho	Direktur	No : KEP-133/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Jalan Kradenan Asri D-23, RT.002/ RW.011, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Semarang
3.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	No : KEP-134/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2018 (4 tahun)	Indonesia	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/ No.1028 Semarang

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
-	-	-	-	-	-	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
-	-	-	-	-

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris

Direksi

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.

Dewan Komisaris

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	Ketua	KPRI Bhakti Praja	Koperasi
			Kepala	Dinas ESDM Prov. Jateng	Pemerintahan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	M. Nazir Siregar	▪ Great Trainer In Action - E L/T	11-14 Februari 2019	HR Excellency Jakarta
		▪ Building Personal Intelligence with NLP	17-19 Oktober 2019	HR Excellency Semarang
		▪ Seminar Indonesia Risk Management Outlook 2020, Prospek IRMO 2020 "strengthening risk mitigation amid global downturn"	12 Nov 2019	Le Meridien Hotel Jimbaran - Bali
		▪ Seminar Nasional "Prospek Ekonomi & Pertumbuhan Kredit Pasca Pemilu 2019"	24-Apr-19	Luwansa Hotel Jakarta
		▪ Seminar Pemanfaatan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik	24 Sep 19	Patra Jasa Semarang
		▪ Seminar Artificial Intelligence Implications & Insurance Business Sustainability (program Pemeliharaan)	27-Nov-19	Hotel Borobudur Jakarta
		▪ Seminar Opportunities and challenges amid Softening Global Economy 2020 : Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry	28-Nov-19	Pullman Jakarta

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
2.	Adi Nugroho	▪ Pelatihan Pengawas Syariah Muamaliah Maliah	2-4 Mei 2019	DSN MUI Jakarta
		▪ Membangun Budaya Risiko yang sehat di Perusahaan & Tren Strategis Perekonomian Indonesia	30-Sep-19	BSMR di Jakarta
		▪ Building Personal Intelligence with NLP	17-19 Oktober 2019	HR Excellency Semarang
		▪ Minat Indonesia - Problem Solving & Decision Making	16-20 Des 2019	PPM Manajemen Jakarta

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training / Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Master Class Risk Governance & Certification in Singapore	29-30 Agustus 2019	CRMS di Singapore

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Selama periode tahun buku 2019, kegiatan Dewan Komisaris masih difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

Atas pemaparan dari Direksi di atas, Dewan Komisaris memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Sampai dengan 31 Desember 2019, Komisaris Independen masih dalam proses pengajuan ke OJK

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan 12 (dua belas) kali selama tahun 2019

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. NAZIR SIREGAR	12	0	100%
2.	ADI NUGROHO	12	0	100%

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat.

Sampai dengan 31 Desember 2019 telah dilaksanakan 4 (empat) kali rapat antara dewan komisaris dengan direksi.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	4	0	100%
2.	M. NAZIR SIREGAR	4	0	100%
3.	ADI NUGROHO	4	0	100%

c. Rapat DPS

Rapat Direksi dilakukan 12 (dua belas) kali selama tahun 2019

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:
 1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris

3. Frekuensi rapat komite audit / fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris		

4. Program kerja komite audit / fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi yang membantu Dewan Komisaris

5. Struktur komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki struktur komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki program kerja komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2015, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Direktur Utama membawahi pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga bertugas untuk monitoring ketentuan-ketentuan Perusahaan terkait kebijakan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jateng

1. Total Gearing Ratio (Maksimum 40 kali)	21 kali
2. Current Ratio Minimal 120%	390 %
3. Return On Assets	5.8%
4. BOPO	66%
5. Hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)	Sangat Baik

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Kepala Bagian Pelayanan & IT	Pelayanan & IT

2. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

PT. Jamkrida Jateng telah memiliki fungsi Internal Audit yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit merupakan Fungsi yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan. Fungsi Internal Audit akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis dan berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

b. Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal

Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Internal Audit di PT. Jamkrida Jateng merupakan fungsi yang independen karena berada langsung di bawah Direktur Utama.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di semua fungsi kerja PT. Jamkrida Jateng diantaranya :

1. Divisi Customer Relation
2. Departement IT & Pelayanan
3. Departemen Penjaminan Risiko
4. Divi Finance, Accounting & Investasi
5. Unit HRD & GA
6. Unit Legal & Compliance

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Fandy Alvian

Pendidikan Terakhir

S1 Akuntansi, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman Kerja

Admin Supervisor at PT Handal Duta Kinarya (2013-2014)

Junior Auditor KAP RMR & Rekan /

Accounting & Tax Consultant Widjojo Kusumo, BKP, CPA (2015-2017)

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Sampai dengan 31 Desember 2019 Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 1 (satu)

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit dilaksanakan sebulan sekali, sama seperti periode pemeriksaan internal audit. Laporan Internal Audit berisi rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing fungsi dan tanggapan dari masing-masing fungsi terkait rekomendasi tersebut. Laporan Internal Audit disampaikan langsung oleh internal audit kepada direktur utama

3. Fungsi auditor eksternal

Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2015	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD (AP.0430)	Rp.35.000.000,-
2016	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD (AP.0430)	Rp.35.000.000,-
2017	KAP ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	J. ANWAR HASAN, CPA. (AP.0091)	Rp.40.000.000,-
2018	KAP RICHARD RISAMBESSY DAN REKAN	SALMON SIHOMBING (AP.0287)	Rp. 70.000.000,-
2019	KAP HERU SATRIA RUKMANA	HERU SATRIA RUKMANA (AP.1520)	Rp. 70.000.000,-

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.

Dewan Komisaris

Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk appetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya
- Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang (*forward looking*) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (*risk appetite*) yang didefinisikan oleh Direksi

4. Struktur organisasi sistem informasi

Dalam struktur organisasi sistem informasi masuk ke dalam fungsi Pelayanan dan IT

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Teknologi informasi yang digunakan di perusahaan adalah Aplikasi *AppLine* dan CMS. Untuk pengendalian internalnya adalah pada fungsi-fungsi tertentu hanya dapat melakukan akses fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi tersebut, satu fungsi tidak bisa mengakses fitur dari fungsi lainnya.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, *economic capital model* mereflesikan *profile* risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
- Pemantauan risiko

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Direksi	Dewan Komisaris
<ul style="list-style-type: none">• Gaji Bulanan• Tunjangan Hari Raya• Bonus Akhir Tahun• Tunjangan Pertengahan Tahun• Bonus Kinerja (Jasa Produksi)	<ul style="list-style-type: none">• Gaji bulanan• Tunjangan Hari Raya• Biaya kehadiran dalam meeting• Bonus Akhir tahun• Tunjangan Pertengahan Tahun• Bonus Kinerja (Jasa Produksi)

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Direksi	Dewan Komisaris
<ul style="list-style-type: none">• Mobil Dinas• Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja• Supir/<i>Driver</i>• BPJS Kesehatan• BPJS Ketenagakerjaan• Asuransi Jiwa• Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi• Penggantian biaya transportasi• Penggantian biaya komunikasi• Cuti tahunan dan cuti masa kerja• DPLK	<ul style="list-style-type: none">• Mobil Dinas• Asuransi Jiwa• Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi• Tunjangan transportasi• BPJS Ketenagakerjaan• DPLK

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan RUPS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	2 (dua)	2 (dua)
Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.439.988.473,-	Rp. 156.000.000,-
Dewan Komisaris	1 (satu)	1 (satu)
Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 351.502.267,-	Rp. 66.000.000,-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)		
Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)		
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2 (dua)	
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah		1 (satu)

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 5.75
- rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah 1.25
- rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah 1.25
- rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1.91

F. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih. yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. NAZIR SIREGAR	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
2.	ADI NUGROHO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
3.	SUJARWANTO DWIATMOKO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin

G. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain. anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. NAZIR SIREGAR	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2.	ADI NUGROHO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris. anggota DPS lain. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memilik DPS					

H. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Belum terdapat pengunduran diri maupun pemberhentian Auditor Eksternal

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan tidak terdapat transaksi material dengan pihak terkait

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan / atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
1.	Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan				

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan tidak terdapat informasi material lainnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Sampai dengan 31 Desember 2019 Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	-	-	-
2.	-	-	-

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMT	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi. dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	-	-
Total	-	-

KILAS BALIK PERUSAHAAN



20 Desember 2019, PT Jamkrida Jateng dengan BPR Surya Yudha Banjarnegara melakukan penandatanganan bersama LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) di Hotel Azana Semarang

16 Oktober 2019, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang dilaksanakan di Kantor Pusat BSSN



17 September 2019, PT Jamkrida Jateng menjadi salah satu pengisi Acara Rapat Koordinasi Nasional Penerapan Akuntansi berbasis Akruar di Universitas Gadjah Mada

20 Agustus 2019 PT. Jamkrida Jateng bersama dengan Pemprov Jateng melakukan Kunjungan Kerja ke PT. Jamkrida Bali



09 Agustus 2019, Sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit antara PT. Jamkrida Jateng dan BKK Jateng bertempat di Hotel Lor In Solo



22 Juli 2019, Launching Program Desa Dampungan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan difokuskan pada 14 kabupaten prioritas di Provinsi Jawa Tengah



10 Mei 2019. PT. Jamkrida Jateng melakukan Sosialisasi Akses Permodalan UMKM bagi Asosiasi Pengusaha Muslimah bersama PD. BPR BKK Ungaran dan KSPPS NU Sejahtera

25 April 2019 Pameran Hasil Karya UMKM Mitra binaan PT. Jamkrida Jateng dalam Expo Kabupaten Semarang



22 Maret 2019, Sosialisasi Surety Bond di Balai Satker VII APBN Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Jamkrida Jateng

16 Maret 2019, PT. Jamkrida Jateng bersama dengan Kospin Jasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR



19 Februari 2019, PT Jamkrida Jateng memberikan pemaparan pada Workshop Optimalisasi bagi Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara

11 Januari 2019, Kunjungan Kerja PT Jamkrida Jatim bersama Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di PT Jamkrida Jateng



AKTIVITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL

07 November 2019 Penyerahan bantuan 1 Unit Laptop kepada PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) "Komunitas Mutiara" wilayah Kebumen

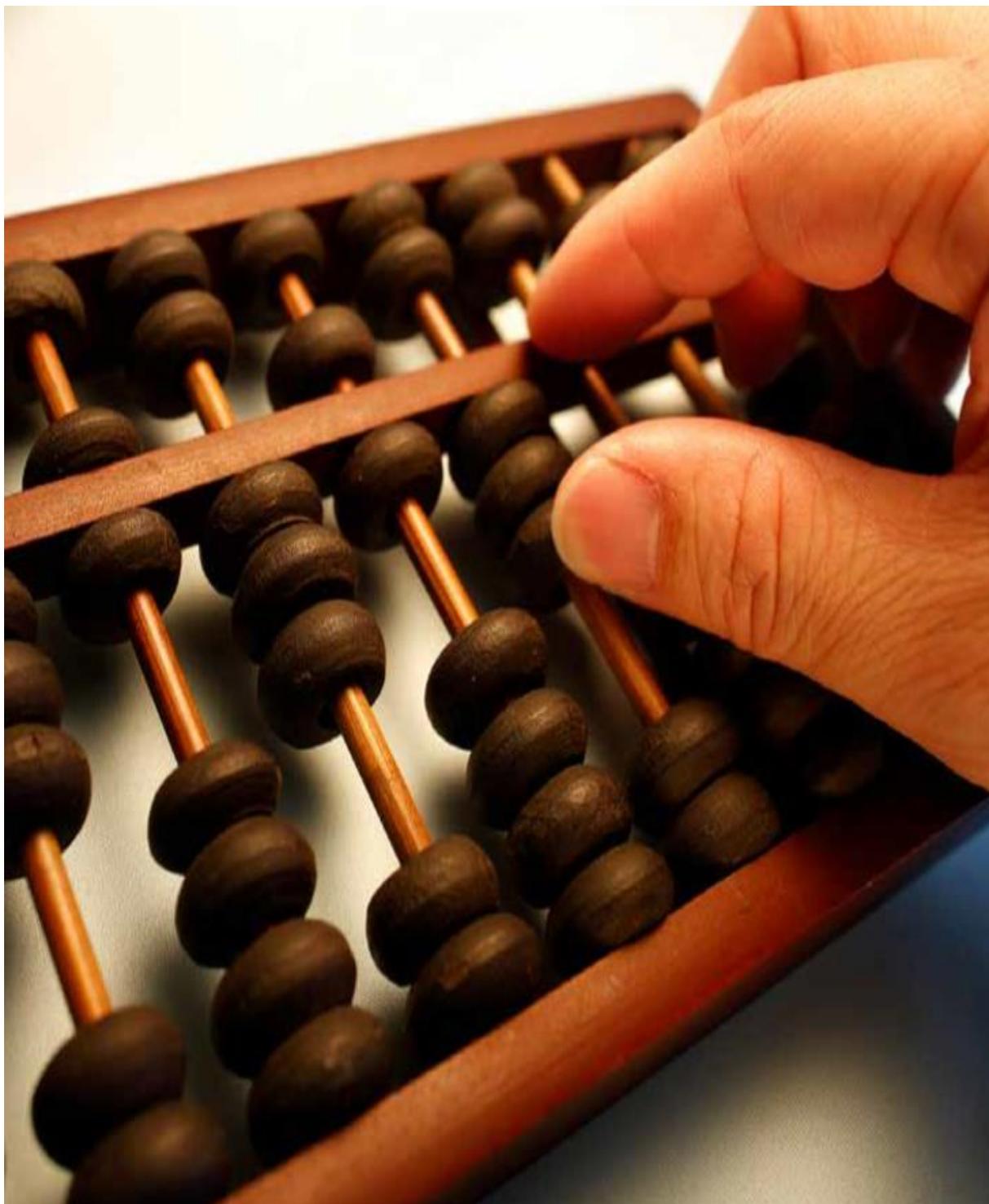


01 November 2019, Penyerahan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) Jambanisasi di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Wonosobo dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo

17 Mei 2019, PT. Jamkrida Jateng melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa santunan di Masjid Mujahidin, Semarang Utara



LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2019

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	58,877,596,588	53,821,899,148
Investasi		
Deposito Berjangka	99,730,000,000	89,450,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	31,405,700,000	27,488,300,000
Piutang IJP		
Piutang Co-guarentee/ Reasuransi / Penjaminan Ulang	6,209,004,441	6,924,127,502
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,054,464,313	1,735,420,512
Biaya Dibayar Dimuka	17,584,738,423	32,062,502
Pajak Dibayar Dimuka		
Aset lancar lain-lain	1,466,341,281	924,892,812
Jumlah Aset Lancar	216,327,845,046	180,376,702,476
Aset Tidak Lancar		
Beban dibayar dimuka	52,786,900,025	40,705,860,876
Aset tetap (Neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp dan Rp 1.325.633.712).	3,397,805,384	2,129,915,628
Aset Sewa Guna Usaha	1,279,687,500	
Aset tidak berwujud - bersih	2,583,008,420	1,863,870,594
Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan		
Aset pajak tangguhan - bersih	1,137,604,655	1,117,312,656
Aset lain-lain - bersih		1,301,370,082
Jumlah Aset Tidak Lancar	61,185,005,984	47,118,329,836
JUMLAH ASET	277,512,851,030	227,495,032,312

Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Utang Klaim	3,227,966,452	1,526,268,710
IJP yang Ditangguhkan	35,588,385,707	22,660,411,073
Utang Pajak	1,472,331,711	1,497,818,996
Utang Premi Reasuransi	3,103,979,062	1,667,290,007
Utang Akuisisi	2,200,129,307	1,592,456,497
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	45,755,526	26,719,894
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	924,647,300	-
Cadangan Klaim	7,071,364,825	6,114,199,752
Liabilitas Lancar Lain - Lain	1,770,934,648	-
Jumlah Liabilitas Lancar	55,405,494,538	35,085,164,929
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
IJP yang Ditangguhkan	57,973,776,576	35,349,687,564
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1,587,970,940	2,645,692,696
Liabilitas Lancar lain-lain		141,076,500
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	59,561,747,516	38,136,456,760
JUMLAH LIABILITAS	114,967,242,054	73,221,621,689
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal	145,780,000,000	144,950,000,000
Tambahan Setoran Modal		
Cadangan		
a. Cadangan Umum	4,988,082,679	2,387,513,757
b. Cadangan Tujuan	197,157,105	450,136,109
Laba Ditahan		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12,422,853,210	8,601,731,255
Pendapatan Konprehensif lainnya	(842,484,018)	(2,115,970,496)
JUMLAH EKUITAS	162,545,608,976	154,273,410,623
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	277,512,851,030	227,495,032,312

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Tahun Berakhir 31 Desember 2019
 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	50,997,734,465	30,939,854,033
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(10,397,741,791)	(5,855,065,009)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan	(5,585,168,780)	(2,691,315,930)
JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH	35,014,823,894	22,393,473,095
Beban Klaim		
Beban Klaim Bruto	(29,792,065,054)	(25,854,575,206)
Klaim Co-guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	14,135,968,336	17,726,214,338
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(957,165,080)	(811,160,565)
Beban Klaim Lainnya	(448,700,738)	(556,515,644)
Jumlah Beban Klaim	(17,061,962,536)	(9,496,037,077)
Pendapatan Penjaminan Bersih	17,952,861,358	12,897,436,018
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Bunga	9,478,376,798	8,543,834,900
Pendapatan Investasi Selain Bunga	1,450,420,085	2,007,086,388
Pendapatan Operasional Lain - Lain	982,688,955	790,057,314
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	11,911,485,840	11,340,978,602
Beban Operasional Lainnya		
Beban Gaji dan Tunjangan	(4,368,769,423)	(6,806,978,540)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(1,268,739,501)	(982,323,787)
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	(8,745,035,278)	(6,070,914,443)
Beban Operasional Lain - Lain	(15,155,685)	-
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(14,397,699,888)	(13,860,216,770)
Laba Operasional	15,466,647,310	10,378,197,849

Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	565,070,024	1,216,153,204
Beban Non Operasional		(40,255,984)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	565,070,024	1,175,897,221
Laba Sebelum Pajak	16,031,717,334	11,554,095,070
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pajak kini		
a. Pajak Final	2,016,815,613	1,858,241,146
b. Pajak Non Final	2,036,836,000	1,401,940,005
Pajak Tanggihan	(444,787,491)	(307,817,335)
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	3,608,864,123	2,952,363,816
Laba Bersih	12,422,853,210	8,601,731,255
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Rugi Laba Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto	175,813,523	269,379,647
Pos yang akan direklasifikasikan ke Rugi Laba Bunga obligasi belum terealisasi-neto	1,449,300,000	(2,391,840,750)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	14,047,966,734	6,479,270,151

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
 Tahun Berakhir 31 Desember 2019
 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak	16,031,717,334	11,554,095,070
Penyesuaian :		
Depresiasi dan amortisasi	1,354,052,001	982,323,786
Pendapatan komprehensif lainnya	(1,625,113,523)	(2,122,461,104)
Imbalan pasca kerja	771,131,167	1,376,129,991
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	957,165,080	811,160,565
Pajak final	(2,036,836,000)	(1,858,241,145)
Perubahan:		
Piutang IJP		1,163,277,040
Piutang Co-guarantee/Reasuransi/Penjaminan Ulang	715,123,062	(4,879,456,861)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	680,956,197	80,430,082
Biaya Dibayar Dimuka	(17,552,675,921)	323,312,498
Pajak Dibayar Dimuka		16,764,426
Aset Pajak Tangguhan	(20,291,998)	(1,015,304,370)
Aset lancar lain-lain	(541,448,468)	(403,920,724)
Beban dibayar dimuka	(12,081,039,149)	(20,776,907,909)
Aset lain-lain - bersih	1,301,370,082	(1,202,893,567)
Utang Klaim	1,701,697,742	337,777,438
IJP yang Ditangguhkan	36,629,715,401	27,565,948,996
Utang Pajak	(25,487,284)	1,059,609,213
Utang Premi Reasuransi	1,436,689,054	404,172,420
Utang Akuisisi	607,672,810	580,265,420
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	19,035,632	(38,696,103)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	924,647,300	(785,000,000)
Cadangan Klaim	957,165,072	811,160,565
Liabilitas Lancar Lain - Lain	1,770,934,648	(2,525,913,019)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(1,057,721,755)	1,016,957,129
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi	30,918,458,485	12,474,589,837
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan/(Penempatan) Investasi	(16,229,940,000)	(13,933,613,444)
Perolehan aset tetap	(2,272,830,208)	(250,511,244)
Perolehan Aset sewa guna usaha	(1,365,000,000)	
Perolehan Aset tidak berwujud	(1,298,339,697)	(967,303,515)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(21,166,109,905)	(15,151,428,203)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal disetor	830,000,000	23,850,000,000
Utang Leasing	924,647,300	
Pembayaran deviden dan Jasa Produksi, dll	(6,451,298,440)	(4,253,684,455)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(4,696,651,140)	19,596,315,545
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5,055,697,439	16,919,477,179
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	53,821,899,148	36,902,421,969
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	58,877,596,588	53,821,899,148

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Berakhir 31 Desember 2019 dengan angka perbandingan tahun 2018

Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba		Jumlah
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2018	121,100,000,000	1,508,961,443	5,582,372,874	128,191,334,317
Setoran modal				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	200,000,000	-	-	200,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	1,500,000,000			1,500,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	150,000,000	-	-	150,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	2,000,000,000			2,000,000,000
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20,000,000,000			20,000,000,000
Cadangan			(5,582,372,874)	(5,582,372,874)
Dana kesejahteraan	-	(279,100,776)	-	(279,100,776)
Dana sosial	-	223,554,539	-	223,554,539
Umum	-	1,390,725,267	-	1,390,725,267
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja		269,379,647		269,379,647
Revaluasi Obligasi		(2,391,840,750)		(2,391,840,750)
Laba tahun berjalan	-	-	8,601,731,254	8,601,731,254
Saldo 31 Desember 2018	144,950,000,000	721,679,370	8,601,731,254	154,273,410,624
Setoran modal				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	830,000,000			830,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja				
Pemerintah Kabupaten Temanggung				
Pemerintah Kabupaten Demak				
Cadangan			(8,601,731,254)	(8,601,731,254)
Dana kesejahteraan				
Dana sosial		(252,979,003)		(252,979,003)
Umum		2,600,568,922		2,600,568,922
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja		(51,778,726)		(51,778,726)
Revaluasi Obligasi		1,325,265,202		1,325,265,202
Laba tahun berjalan			12,422,853,210	12,422,853,210
Saldo 31 Desember 2019	145,780,000,000	4,342,755,765	12,422,853,210	162,545,608,975

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019, dengan Angka Perbandingan Tahun 2018
(dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. DASAR PENYUSUNAN

a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147A/SK/DIR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah diputuskan bahwa Perusahaan mulai tanggal 18 Desember 2017 mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2019 dengan angka komparatif 2018 telah disajikan sesuai dengan SAK dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk seluruh periode disajikan dalam laporan keuangan.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito berjangka seperti disebutkan di atas, dikurangi overdraft, jika ada.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijamin dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- 1 Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;

- ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (b);
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (b) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak- pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat transaksi terjadi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengukuran sesuai dengan SAK . Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan mengambil untung dalam jangka pendek. Saham yang diperdagangkan dalam bursa saham yang dimiliki untuk diperjual belikan termasuk dalam klasifikasi aset keuangan ini.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Merupakan Aset keuangan non-derivatif yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan ini antara lain Promes dan Kertas Berharga Lainnya.

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif. Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang co-guarantee, utang pajak, utang komisi/akuisisi, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan nilai wajar sebagai berikut:

- a. Nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Perusahaan mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
- b. Dalam kasus lain, diperkenankan untuk menanggulung selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengakui bahwa selisih yang ditanggulung sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.

Pengukuran Aset Keuangan Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:

- 1) **Pinjaman yang diberikan dan piutang, Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- 2) **Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- 3) **Aset keuangan tersedia untuk dijual**
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

Pengukuran Liabilitas Keuangan Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan, biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,
2. Pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan, karena Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh resiko, atau jika Perusahaan masih mengakui asset dikarenakan adanya keterlibatan berkelanjutan dengan asset tersebut, maka Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait,
3. Liabilitas keuangan yang timbul dari kontrak jaminan keuangan,
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dibawah suku bunga pasar.

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi.
- b. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.
- c. Dividen atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi ketika ditetapkan hak entitas untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut.

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika asset atau liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Perusahaan mengalihkan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Saling Hapus

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Perusahaan pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut kedalam aset keuangan yang memiliki karakteristik resiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, dibalik baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Jumlah pembalikan aset keuangan diakui dalam laba rugi.

2. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan

komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun asset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibalik melalui laporan laba rugi.

e. Co - Guarantee/ Reasuransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra reasuransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang klaim co-guarantee/ reasuransi dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi, namun belum dilakukan pembayarannya.

f. Beban dibayar dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban co-guarantee, beban reasuransi, diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan imbalan jasa penjaminannya.

Fee based income, beban bank-pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan.

g. Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan	4 - 8 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Partisi	4 tahun

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikutan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi di perhitungkan dalam laporan laba rugi untuk periode/ tahun bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

h. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

i. Aset Sewa Guna Usaha

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dari resiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Penyusutan aset sewa guna usaha dan amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaatnya.

j. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP), pendapatan komisi reasuransi dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, beban fee based income-bank pelaksana, beban co-guarantee dan beban reasuransi diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan komisi reasuransi diakui seluruhnya pada saat pembayaran IJP ke reasuransi dilakukan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan berdasarkan struktur biaya (penjaminan kredit) dan untuk suretyship berdasarkan jasa administrasi yang telah ditetapkan.

Beban fee based income-bank pelaksana, beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan, sedangkan beban co-guarantee dan beban reasuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income-bank, beban komisi agen, beban co guarantee dan beban reasuransi.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminan atau terdapat pengajuan klaim yang diterima oleh Perusahaan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

l. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai

akibat proses telaah lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

m. Cadangan Klaim

Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak regulator telah menentukan pembatasan minimum pembentukan cadangan bagi lembaga penjamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- 0.01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
- Penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) selama 3 bulan terakhir, mana yang lebih banyak. IBNR di atas dihitung berdasarkan rata-rata klaim yg ditanggung sendiri yg telah dibayarkan selama 3 bulan terakhir

n. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat dan menyisihkan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK 24 "Imbalan Pascakerja". Pengakuan Kewajiban tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini. Pajak kini diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian.

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, ketika hasil banding tersebut telah ditetapkan.

p. Standar Akuntansi Baru, Revisi dan Interpretasi berlaku efektif 1 Januari 2020

1. PSAK No.71

Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen

2. PSAK No.72

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Standar akuntansi ini mengharuskan Perusahaan menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. Perusahaan harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi.

3. PSAK No.73

Sewa, yang diadopsi dari IFRS No. 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan). PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan

mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use-assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

q. Penggunaan Estimasi

Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Asumsi tersebut mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3 KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas		
- Kas	2,223,600	487,800
Setara Kas Operasional		
- Bank Mandiri Banyumanik	1,589,737,349	1,021,482,742
- Bank Mandiri Banyumanik		11,925,032
- Bank Mandiri Banyumanik		278,577,369
Setara Kas IJP	57,285,635,639	51,969,426,205
Jumlah	58,877,596,588	53,281,899,148

4 INVESTASI

Rincian investasi terdiri dari:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Deposito Berjangka	99,730,000,000	89,450,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	31,405,700,000	27,488,300,000
Jumlah	131,135,700,000	116,938,300,000

Penjelasan atas investasi ini disajikan sebagai berikut :

Obligasi Negara Seri FR0074, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2032

Obligasi Negara Seri FR0075, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2038.

Obligasi Negara Seri FR0068, tingkat bunga 8,38% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2034

Obligasi Negara Seri FR0072, tingkat bunga 8,25% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2036.

Obligasi Negara Seri FR0080, tingkat bunga 7,50% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2035.

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, tingkat bunga 8,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017, tingkat bunga 8,6% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2022.

5 PIUTANG IJP

Jumlah saldo piutang IJP per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang IJP		466,190,145
Jumlah		466,190,145

6 PIUTANG CO-GUARANTEE / REASURANSI/ PENJAMINAN ULANG

Jumlah saldo piutang co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang co-guarantee/ reasuransi/ penjaminan ulang	6,209,004,441	6,924,127,502
Jumlah	6,209,004,441	6,924,127,502

7 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Rincian pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,054,464,314	1,735,420,512
Jumlah	1,054,464,314	1,735,420,512

Pendapatan yang harus diterima merupakan pendapatan iuran atas jasa penjaminan yang masih harus diterima.

8 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - LANCAR

Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sewa Kantor	199,850,000	32,062,502
IJP Reasuransi Nasional Re	9,873,642,026	
IJP PT Equity Life Indonesia	67,303,382	
IJP Asuransi Umum Videi	130,122,530	
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	7,297,470,484	
Lain-lain	16,350,000	
Jumlah	17,584,738,422	32,062,502

9 ASET LANCAR LAIN - LAIN

Aset lancar lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang IJP	1,466,341,281	466,190,145
Lain-lain	-	458,702,667
Jumlah	1,466,341,281	924,892,812

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - TIDAK LANCAR

Biaya dibayar dimuka tidak lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
IJP Reasuransi Nasional Re	25,205,412,017	20,948,201,266
IJP PT Equity Life Indonesia	109,477,966	278,978,612
IJP Asuransi Umum Videi	9,570,312	213,952,768
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	27,462,439,724	19,264,728,228
Jumlah	52,786,900,019	40,705,860,876

12. ASET SEWA GUNA USAHA - BERSIH

Rincian aset sewa guna usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	-	1,365,000,000	-	1,365,000,000
Jumlah	-	1,365,000,000	-	1,365,000,000
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	-	85,312,500	-	85,312,500
Jumlah	-	85,312,500	-	85,312,500
Nilai Buku	-			<u>1,279,687,500</u>

13. ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Jumlah saldo aset tidak berwujud - netto per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	2019			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	2,367,885,387	1,298,339,697		3,666,225,084
Jumlah	<u>2,367,885,387</u>	<u>1,298,339,697</u>		<u>3,666,225,084</u>
Amortisasi				
Perangkat Lunak	504,014,794	579,201,871		1,083,216,665
Jumlah	<u>504,014,794</u>	<u>579,201,871</u>		<u>1,083,216,665</u>
Jumlah Aset Neto	<u>1,863,870,593</u>			<u>2,583,008,419</u>
	2018			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	1,400,581,872	967,303,515		2,367,885,387
Jumlah	<u>1,400,581,872</u>	<u>967,303,515</u>		<u>2,367,885,387</u>
Amortisasi				
Perangkat Lunak	184,779,843	319,234,950		504,014,793
Jumlah	<u>184,779,843</u>	<u>319,234,950</u>		<u>504,014,793</u>
Jumlah -Neto	<u>1,215,802,029</u>			<u>1,863,870,593</u>

14. ASET LAIN - LAIN

Saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp 0,- dan Rp 1.301.370.803,-.

15. UTANG KLAIM

Utang klaim per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah masing-masing sebesar Rp. 2.445.966.453,- dan Rp. 1.526.268.710,-.

16. IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
IJP ditangguhkan lancar	35,588,385,707	22,660,411,073
IJP ditangguhkan - tidak lancar	57,973,776,576	35,349,687,564
Jumlah	93,562,162,283	58,010,098,637

17. PERPAJAKAN

Saldo utang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

a. Utang Pajak

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pajak Penghasilan Badan	1,129,004,755	946,383,176
Pajak penghasilan 21	109,658,308	95,867,011
Pajak penghasilan 23	11,980	11,980
Pajak penghasilan 25	233,656,668	455,556,829
Jumlah	1,472,331,711	1,497,818,996

b. Pajak Tangguhan

	2019		31 Desember 2019
Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain		
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	385,096,535	(36,675,752)	348,420,782
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	319,068,123	239,291,270	558,359,393
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	-		
Akrual bunga deposito	(117,302,465)	184,783,501	67,481,037
Revaluasi harga pasar obligasi	777,857,141	(483,100,000)	294,757,141
Akrual bunga obligasi	(247,406,679)	115,992,979	(131,413,699)
Jumlah	1,117,312,656	20,291,998	1,137,604,654

	2018		
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	130,857,253	254,239,282	385,096,535
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	116,277,982	202,790,141	319,068,123
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	49,519,313	(49,519,313)	-
Akrual bunga deposito	(42,165,617)	(75,136,848)	(117,302,465)
Revaluasi harga pasar obligasi	(19,423,111)	797,280,252	777,857,141
Akrual bunga obligasi	(133,057,535)	(114,349,144)	(247,406,679)
Jumlah	102,008,285	1,015,304,370	1,117,312,656

d. Pajak Penghasilan Badan

Estimasi perhitungan pajak berdasarkan laporan laba rugi kena pajak sebagai berikut:

	31 Desember 2019
Laba sebelum pajak	16,031,717,334
Koreksi beda waktu	
Imbalan pasca kerja	(771,131,167)
Kenaikan Cadangan klaim	957,165,080
Akrual Bunga Deposito	(275,162,087)
Akrual Bunga Obligasi	(463,971,918)
Beban penyusutan aset leasing	85,312,499
Angsuran leasing	(165,740,000)
Koreksi beda tetap	
Pendapatan bunga	(8,739,242,793)
Kupon obligasi	(1,450,420,085)
Kenikmatan natura	675,962,200
Biaya promosi/ pemasaran	1,076,058,975
Biaya jamuan & sumbangan	1,186,796,199
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	8,147,344,236
Pembulatan	8,147,344,000

Taksiran pajak penghasilan - non final 25%

Pajak penghasilan - non final				2,036,836,000
Pajak di bayar di muka				
Pajak penghasilan pasal 25				
Pajak penghasilan pasal 23				(907,831,245)
Pajak Penghasilan pasal 29 terutang				<u>1,129,004,755</u>
Taksiran pajak penghasilan - final				
- Pendapatan bunga bank	8,739,242,793	x 20%	=	1,747,848,559
- Pendapatan deviden	1,450,420,086	x 15%	=	217,563,013
Jumlah				<u>1,965,411,572</u>

18. UTANG PREMI REASURANSI

Saldo utang premi reasuransi per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang Reasuransi	3,103,979,062	1,667,290,007
Jumlah	<u>3,103,979,062</u>	<u>1,667,290,007</u>

19. UTANG AKUISISI/FEE BASED BANK

Utang akuisisi per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Hutang Akuisisi	2,200,129,307	1,592,456,497
Jumlah	<u>2,200,129,307</u>	<u>1,592,456,497</u>

20. UTANG IJP CO-GUARANTEES / PENJAMINAN ULANG

Saldo utang IJP per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang <i>co Guarantee</i>	45,755,526	26,719,894
Jumlah	<u>45,755,526</u>	<u>26,719,894</u>

21. CADANGAN KLAIM

Jumlah saldo cadangan klaim per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Cadangan Klaim	7,071,364,825	6,114,199,752
Jumlah	<u>7,071,364,825</u>	<u>6,114,199,752</u>

22. LIABILITAS LAIN - LAIN

Liabilitas lain - lain per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Liabilitas Titipan IJP	1,770,934,648	-
Liabilitas Lain - Lain	-	-
Jumlah	<u>1,770,934,648</u>	<u>-</u>

Akun ini terutama menampung penerimaan uang yang belum teridentifikasi dengan jelas dan belum terekonsiliasi karena Perusahaan banyak berhubungan dengan Bank - Bank BPR yang administrasinya belum tertata dengan rapi.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sebagai bagian dari Perusahaan Daerah, Perusahaan juga wajib mengikuti Peraturan Gubernur Kepala Daerah terkait dengan ketentuan atas penyisihan kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Jawa Tengah No.2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 19 bahwa anggota Dewan Komisaris mendapat jasa pengabdian secara kolektif sebesar 2% dari laba sebelum pajak dan di pasal 40 mengatur bahwa Dewan Direksi mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif sebesar 5% dari laba sebelum pajak pada akhir tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.

Biaya yang dibebankan ke laba/rugi 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Imbalan pasca kerja	381,121,042	292,974,809
Jasa pengabdian (per Gub)	(1,152,252,209)	814,445,380
Jumlah	(771,131,167)	1,107,420,189

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 51 karyawan di tahun 2019 dan 49 karyawan di tahun 2018.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/2018	
Metode	<i>Projected Unit Credit Method</i>	
Tingkat diskonto	7,91% / 8,46%	
Jumlah Karyawan	51 / 49	
Tingkat kematian	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia III 2011 (TMI III -2011)	
Tingkat kenaikan gaji	10%	
Tingkat cacat	5% dari tabel mortalitas dari usia 20 hingga 54 tahun	
Tingkat pengunduran	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011	
Usia Pensiun	56 tahun	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Imbal Jasa Pengabdian	1,587,970,940	1,673,260,829
Imbalan Pasca Kerja	-	972,431,867
Jumlah	1,587,970,940	2,645,692,696

Ikhtisar perhitungan imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2019 dan 2018 berdasarkan laporan Aktuaris PT Sigma Prima Solusindo Nomor: 117/SPS/R-I/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan Nomer 248/SPS/R-I/I/2019 tanggal 1 April 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada awal tahun	972,431,867	769,920,119
Biaya Bunga	82,267,736	49,640,512
Koreksi estimasi tahun lalu	-	(55,668,141)
Biaya Jasa Kini	348,138,671	243,334,297
Nilai Ekspektasi Pembayaran Manfaat	-	(3,901,341)
Nilai Ekspektasi dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti pada akhir tahun	1,402,838,274	1,003,325,446
(Keuntungan) / Kerugian aktuarial atas Kewajiban	185,132,666	(30,893,579)
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada akhir tahun - Aktual	1,587,970,940	972,431,867

Sejak tahun 2018 Perusahaan menghitung kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aktuarial yang sebelumnya dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri. Perhitungan oleh aktuarial dilakukan secara retroaktif dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen Perusahaan mencatat koreksi atas selisih perhitungan aktuarial secara prospektif, oleh karenanya seluruh penyesuaian atas perhitungan aktuarial dibebankan dan dicatat pada tahun berjalan (2018), karena manajemen menganggap tidak praktis untuk mencatat dampak penyesuaian aktuarial secara retroaktif mengingat pengaruhnya terhadap perhitungan laba bersih dan laba bersih setelah pajak yang telah disetujui dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun sebelumnya.

24. MODAL DISETOR

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Akta No. 120 dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., M.B.A., M.S.I.S., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang tanggal 29 April 2019 mengenai persetujuan penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 830.000.000 yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AHA.01.03-022362. Setelah adanya penambahan modal tersebut maka komposisi kepemilikan saham PT JAMKRIDA JATENG per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	14,000	96.04%	140,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.37%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.37%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.38%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	123	0.84%	1,230,000,000
Jumlah	14,578	100%	145,780,000,000

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS - LB) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Akta No. 72 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana

Tedjosaputro S.H., M.H., Notaris di Semarang tanggal 21 November 2018, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 200.000.000.000,- terbagi dalam 20.000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000.000,-, dan dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebanyak 12.495 lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2018		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	12,000	96%	120,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.6%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.6%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.4%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	40	0.3%	400,000,000
Jumlah	12,495	100%	124,950,000,000

25. CADANGAN

Saldo cadangan per 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Umum	4,988,082,679	2,387,513,757
Dana sosial	197,157,105	383,040,698
Jasa produksi	-	67,095,411
Jumlah	5,185,239,784	2,837,649,865

Rekonsiliasi Cadangan

	Alokasi laba 2018	Saldo Awal Cadangan	Jumlah Pembayaran	Saldo Akhir Cadangan
Laba Bersih				
Deviden	4,730,952,190	-	(4,730,952,190)	-
Cadangan Umum	2,150,432,814	2,387,513,757	-	4,537,946,571
D Kesejahteraan	602,121,188	-	(602,121,188)	-
Jasa Produksi	774,155,813	67,095,411	(774,155,813)	67,095,411
Dana Sosial	344,069,250	383,040,698	(344,069,250)	383,040,698
Laba Bersih	8,601,731,255	2,837,649,866	(6,451,298,441)	4,988,082,680

Pembagian deviden Perseroan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 71 ayat (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Pasal 71 ayat (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka pembagian laba seharusnya dari laba bersih bukan dari laba komprehensif.

26. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

Jumlah Pendapatan Imbal Jasa Piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	50,997,734,465	30,939,854,033
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(10,397,741,791)	(5,855,065,009)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan	(5,585,168,780)	(2,691,315,930)
Jumlah	35,014,823,894	22,393,473,095

27. BEBAN KLAIM

Jumlah beban klaim untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Klaim Bruto	29,792,065,054	25,854,575,206
Klaim Co-guarantee/penjaminan	(14,135,968,336)	(17,726,214,338)
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	957,165,080	811,160,565
Beban Klaim Lainnya	448,700,738	556,515,644
Jumlah	17,061,962,536	9,496,037,077

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Bunga	9,478,376,798	8,543,834,900
Pendapatan Investasi Selain Bunga	1,450,420,085	2,007,086,388
Pendapatan Operasional Lain - Lain	982,688,955	790,057,314
Jumlah	11,911,485,840	11,340,978,602

29. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Administrasi dan Umum	8,745,035,278	6,070,914,443
Beban gaji dan Pegawai	4,368,769,423	6,806,978,540
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,268,739,501	982,323,787
Beban Operasional Lain - Lain	15,155,685	-
Jumlah	14,397,699,888	13,860,216,770

30. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan Beban non Operasional yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Non Operasional	565,070,024	1,216,153,204
Beban Non Operasional	-	(40,255,984)
Jumlah	565,070,024	1,175,897,221

31. MANAJEMEN RISIKO

Analisa Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi delapan kategori risiko yang harus dihadapi:

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Terkait dengan risiko strategis, kami pertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko
- Melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan strategik perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan
- Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK No 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan Pasal 43 ayat (2), yaitu paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

Terkait dengan risiko likuiditas, kami pertimbangkan agar masing-masing Unit Kerja dapat mengelola dana yang tersedia secara optimal sehingga dapat diperoleh saldo bank minimal pada tiap akhir periode, misalnya memaksimalkan kegiatan reciprocal bisnis melalui penempatan investasi pada bank mitra sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak di mana pencapaian target funding bank mitra dapat terbantu melalui penempatan investasi dari Perusahaan sedangkan Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan bank mitra agar mempercayakan penjaminan kreditnya pada Perusahaan.

3. Risiko Garansi

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), Recovery Rate dan piutang Co Guarantee/Reasuransi sebagai berikut:

a. Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan risiko klaim ini, maka dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar melakukan analisa penjaminan secara lebih prudent dengan mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku.

b. *Recovery Rate*

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan *Recovery Rate (RR)*, dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi baik melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif, rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/mitra, maupun melalui pemberian fee atas penagih subrogasi.

c. Piutang Co Guarantee / reasuransi

Piutang Co Guarantee/Reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan.

Terkait Piutang Co Guarantee/Reasuransi maka dipertimbangkan agar Divisi IT dan Pelayanan dapat aktif berkoordinasi dengan pihak Reasuransi maupun Co Guarantee dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portfolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Risiko Pasar dapat dilihat dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Yield of Investment (YoI) dan Pencapaian Target IJP Bersih.

a. Yield of Investment (YoI)

YoI digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian YoI tahun terkait.

Terkait dengan YoI tersebut dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan alokasi/diversifikasi portfolio investasi yang optimal.
- Melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin.
- Melakukan review secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.

b. Target IJP Bersih

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersih.

Terkait Target IJP Bersih ini dipertimbangkan pada Divisi IT dan Pelayanan untuk melakukan monitoring terhadap Imbal Jasa Penjaminan, pendapatan komisi reas, premi coguar, premi reas, beban restitusi.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:

- Operasional perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi perusahaan.
- Risiko Hukum Langsung adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
- Risiko Hukum Tidak Langsung adalah risiko yang disebabkan oleh pihak Mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum. Pada tahun 2019 tidak terdapat tuntutan hukum yang berdampak secara finansial ke Perusahaan, sehingga risiko hukum pada tahun 2019 sangat rendah.

Terkait risiko hukum, dipertimbangkan agar masing-masing unit kerja selalu update menggunakan dan mempedomani ketentuan peraturan Perusahaan yang berlaku dalam melakukan setiap kegiatan bisnis maupun operasional Perusahaan sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tentunya akan berdampak pula terhadap reputasi Perusahaan.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.

Terkait dengan risiko reputasi ini dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan
- Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran-saluran komunikasi yang dimiliki;
- Melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktifitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
- Melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggung jawab;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di masyarakat, media, dan media sosial;

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada tahun 2019 tidak terdapat risiko Kepatuhan dikarenakan Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan atau ketentuan yang berlaku pada regulator. Namun demikian Perusahaan akan tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
Melakukan updating peraturan terbaru;

- Melakukan sosialisasi peraturan terbaru berkala melalui berbagai pendekatan dan kanal informasi;
- Melakukan tindak lanjut/penyesuaian atas peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal terkait seperti OJK;
- Melakukan dokumentasi secara tertib terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan;
- Melakukan tindakan korektif atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan / ketentuan eksternal yang berlaku secara tepat waktu.

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas Perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan :		
Kas dan Setara Kas	58,877,596,588	58,877,596,588
Investasi		
Deposito Berjangka	99,730,000,000	99,730,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	32,662,421,000	31,405,700,000
Piutang IJP		
Piutang Co -guarentee / Reasuransi / Penjaminan Ulang	6,209,004,441	6,209,004,441
Jumlah	197,479,022,029	196,222,301,029
Liabilitas Keuangan :		
Utang Klaim	3,227,966,452	3,227,966,452
Utang Pajak	1,472,331,711	1,472,331,711
Utang Premi Reasuransi	3,103,979,062	3,103,979,062
Utang Akuisisi	2,200,129,307	2,200,129,307
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	45,755,526	45,755,526
Jumlah	10,050,162,058	10,050,162,058

33. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun laporan keuangan tahun 2018 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2019.

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sesuai keputusan RUP-LB yang tertuang dalam Akta Notaris No. 40 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh Tini Prihatini, SH., MKn., MH., Notaris di Semarang, bahwa dalam RUPS-LB tersebut telah diputuskan :

1. Memberikan persetujuan pengangkatan Bapak Sujarwanto Dwiatmoko, M.Sc., sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jateng untuk masa jabatan 23 Januari 2020 sampai dengan 6 Desember 2022.
2. Memberikan persetujuan pengangkatan Bapak Herman Budianto sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jateng untuk masa jabatan 23 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2024.
3. Memberikan persetujuan penunjukan KAP Heru Satria Rukmana sebagai auditor laporan PT Jamkrida Jateng tahun 2019 menggantikan KAP Richard Risambessy & Rekan.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-809/NB.11/2019 telah diputuskan bahwa :

1. Sdr. Herman Budianto selaku calon Komisaris Independen PT Jamkrida Jateng telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen pada PT Jamkrida Jateng.
2. Sdr. Herman Budianto disetujui untuk menjadi Komisaris Independen PT Jamkrida Jateng.
3. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 2019.

4. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini bila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Sesuai keputusan para pemegang saham yang tertuang dalam Akta Notaris No. 52 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST., SH., MBA., MSIS., MKn., MH Notaris di Semarang, bahwa dalam keputusan para pemegang saham tersebut telah diputuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan setoran modal Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
2. Menyetujui perubahan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2017 tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu tujuh belas)

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2020.

PERNYATAAN

Laporan Tahunan ini telah disiapkan untuk dan hanya pada kepada Perusahaan sebagai badan hukum dan TIDAK disampaikan kepada orang lain. Perusahaan, para Direktur, karyawan, agen atau penasihat lainnya, Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada orang lain kepada siapa dokumen ini diperlihatkan, atau ke tangan siapa dokumen ini diterima.

Informasi tertentu yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk informasi apa pun mengenai strategi, rencana, atau kinerja keuangan atau operasi perusahaan di masa depan, merupakan “pernyataan berwawasan ke depan”.

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup semua hal yang bukan fakta sejarah. Contoh pernyataan berwawasan ke depan meliputi target dan panduan keuangan yang terdapat dalam dokumen ini secara khusus berkaitan dengan ekuitas, rasio solvabilitas modal, rasio operasi, cadangan tahun sebelumnya, pengurangan biaya, dan akuisisi, hasil investasi, keuntungan terealisasi dan keuntungan yang belum direalisasi dan rentang selera risiko. Sesuai sifatnya, semua pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan atau di luar kendali perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan bukan jaminan kinerja di masa depan. Hasil aktual operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan pengembangan sektor bisnis tempat perusahaan beroperasi dapat berbeda secara material dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini, misalnya secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari, tetapi tidak terbatas pada, kondisi bisnis ekonomi domestik dan nasional,

Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini mencerminkan pengetahuan dan informasi yang tersedia pada tanggal persiapan dokumen ini. Direksi secara tegas menyangkal kewajiban apa pun atau melakukan upaya untuk memperbarui atau merevisi secara terbuka pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diminta untuk melakukannya oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai ramalan laba. Baik konten situs web Jamkrida Jateng maupun konten dari situs web lain yang dapat diakses dari *hyperlink* di situs Jamkrida Jateng dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian dari, dokumen ini.

Informasi Kontak

Kantor Pusat

PT Jamkrida Jateng
Jl Setiabudi No 128 Banyumanik
Semarang
Telp 024 7477 666
Fax 024 7497 0001

www.jamkrida-jateng.co.id

Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Industri Jasa
Keuangan Non Bank (IKNB)

Menara Mulia lantai 11
Jl Gatot Subroto No. 42
Jakarta

Telp 021 29600000

Fax 021 3857917

www.ojk.go.id

Auditor

Heru Satria Rukmana

Perumahan Bukit Waringin Blok A
No. 5-6 Bojong Gede 16320 Bogor

Telepon: +62 21 87970090

Fax : +62 21 87970090

Bank Kustodi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta

Telp 021 5265045

Fax 021 5274477

www.bankmandiri.co.id

Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Biro Perekonomian

Jl Pahlawan No. 9 Mugassari

Semarang Selatan-Kota Semarang

Telp : 024 831 1174, 024 831 1183

Fax : 024 8318890

<http://bioperekonomian.jatengprov.go.id>

Jaringan Kantor Pelayanan

Banyumas

Gedung PLUT

Jl. Senopati, Dukuhwaluh, Kembaran

Kabupaten Banyumas

Solo

Gedung HIPMI

Jl. Bhayangkara No. 57

Baron - Surakarta

Purwodadi

Ruko Depan Hutan Kota Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 16

Purwodadi

Magelang

Jl. Pahlawan

Kelurahan Potrobangsari

Magelang

66 **PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi **MAMPU** menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat** 99



PT Jamkrida Jateng
Jl Setiabudi No 128, Banyumanik, Semarang
Telp 024 7477 666 Fax 024 7497 0001
www.jamkrida-jateng.co.id



PT Jamkrida Jateng

Kantor Pusat :

Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik, Semarang
Telp.(024) 7477666 Fax.(024) 74970001
Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

Kantor Perwakilan Purwodadi :

Ruko Depan Hutan Kota Purwodadi
Jl. Gajah Mada No.16, Purwodadi

Kantor Perwakilan Kudus :

Jl. Kudus Pati KM.08, Jekulo - Kudus

Kantor Perwakilan Solo :

Gedung HIPMI, Jalan Bhayangkara no.57
Baron-Surakarta

Kantor Perwakilan Magelang :

Jl. Pahlawan, Kel. Potrobangsari, Magelang



jamkrida.jateng



jamkrida_jateng



jamkridajateng



jamkridajateng



www.jamkrida-jateng.co.id